



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**



Nomor : 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026

Tanggal : 25 MEI 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan D.I. Panjaltan No. 2 Renon Denpasar Bali

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**

Nomor : 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
1. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
2. Standar Pemeriksaan	3
3. Tujuan Pemeriksaan	3
4. Entitas yang Diperiksa	3
5. Lingkup Pemeriksaan	3
6. Metodologi Pemeriksaan.....	4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	5
8. Batasan Pemeriksaan.....	5
LAMPIRAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	
TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Buleleng bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Bali

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20.B/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/5/2026 tanggal 25 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng yang memiliki 40 perangkat daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 35 hari mulai tanggal 06 April 2026 s.d. 11 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 111/T/ST/DJPKN-VLDPS/PPD.01/04/2026 tanggal 2 April 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

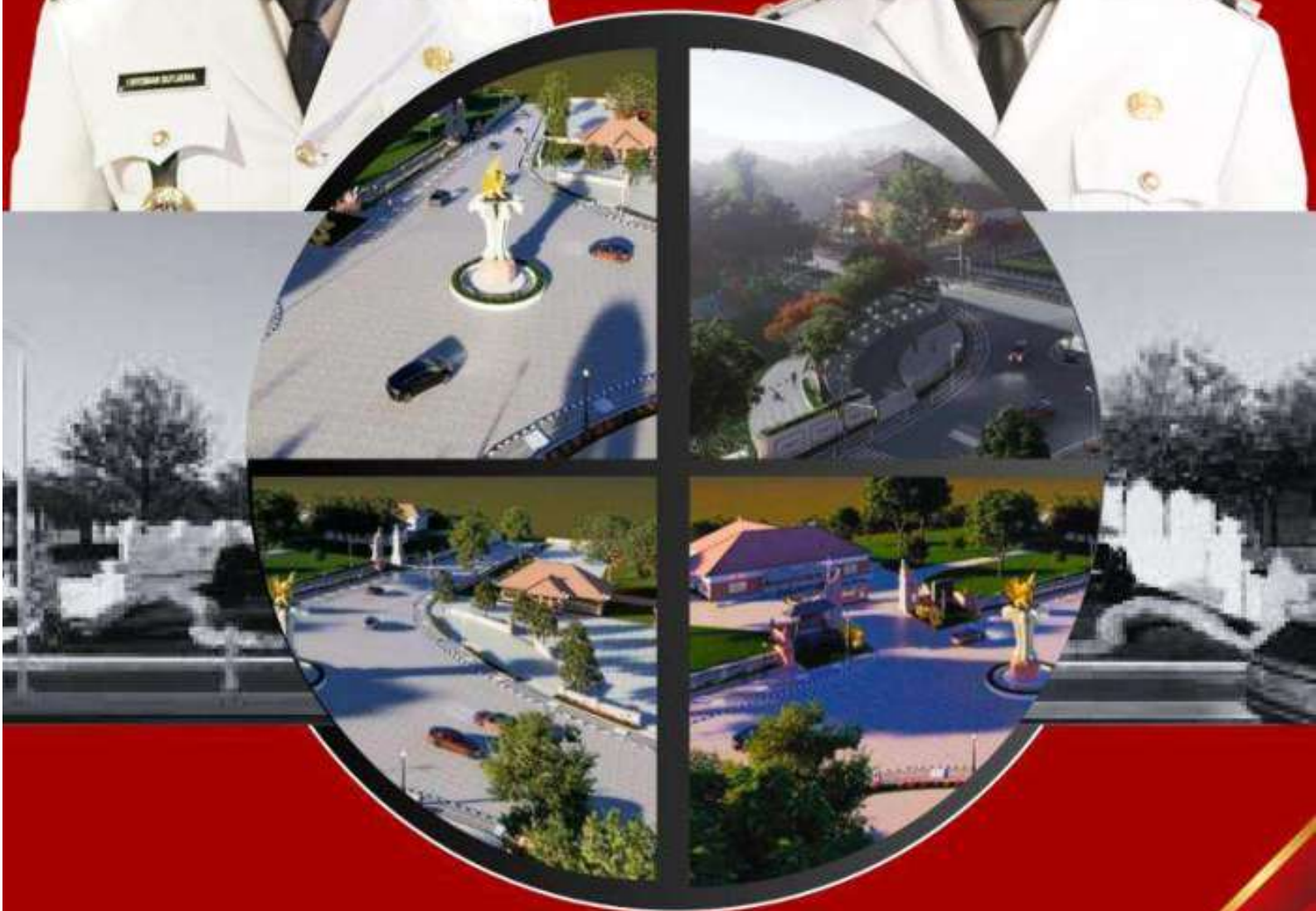
Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025
AUDITED**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xii
LAPORAN KEUANGAN	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL.....	6
LAPORAN ARUS KAS.....	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...	11
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD.....	16
2.1 Ekonomi Makro.....	16
2.2 Kebijakan Keuangan	26
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	30
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	48
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	48
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	51
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	54
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	54
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	58
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.....	58
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	
DAERAH.....	86
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	86
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	127
5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	129
5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	177
5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	199
5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	206
5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan dan Belanja	209
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN	
PEMERINTAH DAERAH	211
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng.....	211
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Buleleng.....	211
6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.....	212

6.4	Penggabungan dan Pemekaran Unit Kerja	213
6.5	Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	214
BAB VII PENUTUP		216

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025	19
Tabel 2.2	Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3	Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025	21
Tabel 2.4	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025	21
Tabel 2.5	Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng TA 2025	22
Tabel 2.6	Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan RLS TA 2025	22
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng	22
Tabel 2.8	Tingkat Inflasi Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.....	23
Tabel 2.9	Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Rangka Pengendalian Inflasi	26
Tabel 2.10	Tingkat Gini Ratio Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.....	26
Tabel 2.11	Mandatory Spending Fungsi Pendidikan Tahun 2025	33
Tabel 2.12	Mandatory Spending Fungsi Pengawasan Tahun 2025.....	36
Tabel 2.13	Mandatory Spending Fungsi Pengembangan Kompetensi Tahun 2025.....	37
Tabel 2.14	Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 .	38
Tabel 2.15	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2025.....	38
Tabel 2.16	Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur Tahun 2025	39
Tabel 2.17	Mandatory Spending Fungsi Hasil Penerimaan Opsen PKB Tahun 2025 ...	44
Tabel 2.18	Mandatory Spending Fungsi Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Tahun 2025.....	45
Tabel 2.19	Mandatory Spending Fungsi Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2025.....	46
Tabel 2.20	Mandatory Spending Fungsi Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2025	47
Tabel 3.2	Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan Perbandingan Tahun 2024	48
Tabel 3.3	Realisasi APBD TA 2025 dan Perbandingan Realisasi TA 2024	49
Tabel 4.1	Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	54
Tabel 5.1	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	86
Tabel 5.2	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	87
Tabel 5.3	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	87
Tabel 5.4	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	89
Tabel 5.5	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	93
Tabel 5.6	Penerimaan Deviden atas Penyertaan Modal	93
Tabel 5.7	Komposisi Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	94
Tabel 5.8	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer.....	96
Tabel 5.9	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	96
Tabel 5.10	Komposisi Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil	96
Tabel 5.11	Komposisi Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum	97

Tabel 5.12	Komposisi Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK).....	98
Tabel 5.13	Komposisi Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik	99
Tabel 5.14	Komposisi Anggaran dan Realisasi Dana Desa	100
Tabel 5.15	Komposisi Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal	100
Tabel 5.16	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah ...	101
Tabel 5.17	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil.....	101
Tabel 5.18	Komposisi Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan	102
Tabel 5.19	Komposisi Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	103
Tabel 5.20	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	103
Tabel 5.21	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	104
Tabel 5.22	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	104
Tabel 5.23	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	107
Tabel 5.24	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah.....	110
Tabel 5.25	Rincian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan	110
Tabel 5.26	Rincian Partai Politik Penerima Hibah.....	111
Tabel 5.27	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial.....	111
Tabel 5.28	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	112
Tabel 5.29	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah	113
Tabel 5.30	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin..	113
Tabel 5.31	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan....	117
Tabel 5.32	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	118
Tabel 5.33	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya...	119
Tabel 5.34	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya.....	121
Tabel 5.35	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga	121
Tabel 5.36	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer	122
Tabel 5.37	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil.....	123
Tabel 5.38	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan	123
Tabel 5.39	Rincian Pembiayaan	124
Tabel 5.40	Komposisi Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan.....	124
Tabel 5.41	Komposisi Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....	125
Tabel 5.42	Rincian SILPA Terikat dan SILPA Non Terikat.....	125
Tabel 5.43	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal	127
Tabel 5.44	Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir	128
Tabel 5.45	Komposisi Neraca	129
Tabel 5.46	Komposisi Aset	129
Tabel 5.47	Rincian Saldo Aset Lancar	130
Tabel 5.48	Rincian Kas dan setara Kas	130
Tabel 5.49	Saldo Kas pada Rekening Kas Umum Daerah	131
Tabel 5.50	Rincian Perhitungan Saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng	132
Tabel 5.51	Rincian Perhitungan Saldo Kas Dana BOSP.....	133
Tabel 5.52	Rincian Saldo Piutang	134
Tabel 5.53	Rincian Saldo Piutang Pajak	134
Tabel 5.54	Rincian Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per Kecamatan.....	135
Tabel 5.55	Rincian Saldo Piutang Retribusi.....	135

Tabel 5.56	Rincian Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	136
Tabel 5.57	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih	139
Tabel 5.58	Rincian Saldo Persediaan	140
Tabel 5.59	Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	140
Tabel 5.60	Rincian Investasi Jangka Panjang	141
Tabel 5.61	Rincian Dana Bergulir.....	141
Tabel 5.62	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen.....	142
Tabel 5.63	Rincian Aset Tetap	144
Tabel 5.64	Mutasi Aset Tetap	144
Tabel 5.65	Rincian Aset Tanah	145
Tabel 5.66	Mutasi Aset Tetap Tanah.....	145
Tabel 5.67	Rincian Peralatan dan Mesin	153
Tabel 5.68	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	154
Tabel 5.69	Rincian Aset Gedung dan Bangunan.....	156
Tabel 5.70	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	156
Tabel 5.71	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	159
Tabel 5.72	Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan.....	159
Tabel 5.73	Rincian Aset Tetap Lainnya	161
Tabel 5.74	Mutasi Aset Tetap Lainnya	161
Tabel 5.75	Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	162
Tabel 5.76	Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	162
Tabel 5.77	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	163
Tabel 5.78	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	163
Tabel 5.79	Rincian Aset Lainnya	165
Tabel 5.80	Rincian Aset Tidak Berwujud	165
Tabel 5.81	Tabel Rincian Aset Lain-Lain	166
Tabel 5.82	Mutasi Aset Lain-Lain.....	166
Tabel 5.83	Rincian Aset yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah.....	168
Tabel 5.84	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	168
Tabel 5.85	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	169
Tabel 5.86	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	169
Tabel 5.87	Properti Investasi.....	170
Tabel 5.88	Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.....	172
Tabel 5.89	Rincian kewajiban jangka pendek	173
Tabel 5.90	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	173
Tabel 5.91	Rincian Utang Belanja.....	174
Tabel 5.92	Rincian Ekuitas.....	176
Tabel 5.93	Rincian Pendapatan – LO.....	177
Tabel 5.94	Rincian Selisih Pendapatan Daerah LO dengan LRA Tahun 2025	177
Tabel 5.95	Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO.....	178
Tabel 5.96	Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	178
Tabel 5.97	Rincian Mutasi Pendapatan Pajak Daerah – LO	179
Tabel 5.98	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	180
Tabel 5.99	Rincian Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	180
Tabel 5.100	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO.....	181

Tabel 5.101 Rincian Mutasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	181
Tabel 5.102 Rincian Deviden dan Pengakuan Keuntungan dengan Pengakuan Investasi	182
Tabel 5.103 Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO	182
Tabel 5.104 Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO.....	184
Tabel 5.105 Rincian Pendapatan Transfer – LO	185
Tabel 5.106 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.....	186
Tabel 5.107 Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.....	186
Tabel 5.108 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.....	186
Tabel 5.109 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	187
Tabel 5.110 Penjelasan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	187
Tabel 5.111 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO.....	187
Tabel 5.112 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	188
Tabel 5.113 Rincian Pendapatan Hibah - LO	188
Tabel 5.114 Penjelasan Pendapatan Hibah – LO	188
Tabel 5.115 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO.....	189
Tabel 5.116 Rincian Beban	189
Tabel 5.117 Rincian Selisih Beban LO dengan Belanja LRA.....	190
Tabel 5.118 Rincian Beban Pegawai.....	191
Tabel 5.119 Rincian Selisih Beban Pegawai dengan Pengeluaran Kas Belanja Pegawai LRA	191
Tabel 5.120 Rincian Beban Barang dan Jasa	191
Tabel 5.121 Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa dengan Pengeluaran Kas Belanja Barang dan Jasa	192
Tabel 5.122 Rincian Beban Hibah.....	192
Tabel 5.123 Rincian Beban Hibah yang Berasal dari Penghapusan BMD Melalui Hibah	193
Tabel 5.124 Rincian Beban Bantuan Sosial	194
Tabel 5.125 Rincian Beban Penyisihan Piutang.....	194
Tabel 5.126 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	195
Tabel 5.127 Rincian Beban Transfer.....	196
Tabel 5.128 Rincian Beban Bagi Hasil	196
Tabel 5.129 Rincian Mutasi Beban Transfer Bagi Hasil.....	196
Tabel 5.130 Rincian Selisih Beban Bantuan Keuangan dengan Belanja Bantuan Keuangan.....	197
Tabel 5.131 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional.....	197
Tabel 5.132 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional	198
Tabel 5.133 Perhitungan Surplus/(Defisit) LO.....	198
Tabel 5.134 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	199
Tabel 5.135 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi.....	200
Tabel 5.136 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi.....	200
Tabel 5.137 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	201
Tabel 5.138 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi.....	201
Tabel 5.139 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.....	202
Tabel 5.140 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....	203

Tabel 5.141 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris.....	203
Tabel 5.142 Perhitungan Kenaikan/(Penurunan) Kas	204
Tabel 5.143 Rincian Saldo Awal Kas.....	204
Tabel 5.144 Rincian Saldo Akhir Kas	204
Tabel 5.145 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar ..	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025	86
Gambar 5.2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah TA 2025	104
Gambar 5.3 Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025	124
Gambar 5.4 Komposisi Neraca TA 2025	129
Gambar 5.5 Komposisi Pendapatan - LO TA 2025	177
Gambar 5.6 Komposisi Beban TA 2025	190
Gambar 5.7 Komposisi Laporan Arus Kas TA 2025	199
Gambar 5.8 Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar TA 2025	207
Gambar 6.1 Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	211

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025
Lampiran 2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per Perangkat Daerah TA 2025
Lampiran 3a	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bansos Per Perangkat Daerah TA 2025
Lampiran 4a	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bansos Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025
Lampiran 6	Data Desa Yang Telah Memenuhi Syarat Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 7	Transfer Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran 2025
Lampiran 8	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2025
Lampiran 9	Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Rekap Realisasi Pendapatan dan Belanja BOSP SD Negeri Tahun Anggaran 2025
Lampiran 13	Rekap Realisasi Pendapatan dan Belanja BOSP SD Swasta Tahun Anggaran 2025
Lampiran 14	Rekap Realisasi Pendapatan dan Belanja SMP Negeri Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15	Rekap Realisasi Pendapatan dan Belanja SMP Swasta Tahun Anggaran 2025
Lampiran 16	Rekap Realisasi Pendapatan dan Belanja PAUD Negeri Tahun Anggaran 2025
Lampiran 17	Rekap Realisasi Pendapatan dan Belanja PAUD Swasta Tahun Anggaran 2025
Lampiran 18	Rekap Realisasi Pendapatan dan Belanja Kesetaraan Negeri Tahun Anggaran 2025
Lampiran 19	Rekap Realisasi Pendapatan dan Belanja Kesetaraan Swasta Tahun Anggaran 2025
Lampiran 20	Sisa Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025
Lampiran 21	Rekap Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 22	Rekap Penerimaan Pajak Hotel Per Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025
Lampiran 23	Rekap Penerimaan Pajak Restoran Per Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025
Lampiran 24	Rekap Penerimaan Pajak Hiburan Per Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025
Lampiran 25	Rekap Penerimaan Pajak Air Tanah Per Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025
Lampiran 26	Rekap Penerimaan Pajak Parkir Per Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025
Lampiran 27	Rekap Penerimaan Pajak Reklame Per Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025
Lampiran 28	Rekap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Per Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025
Lampiran 29	Rekapitulasi Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2025
Lampiran 30	Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 31	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 31 Desember 2025
Lampiran 32	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Per 31 Desember 2025
Lampiran 33	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Per 31 Desember 2025

Lampiran 34	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 35	Piutang Denda Pajak Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 36	Piutang Tranfer dari Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2025
Lampiran 37	Piutang Tranfer dari Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 38	Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 39	Daftar Piutang dan <i>Aging Schedule</i> per 31 Desember 2025
Lampiran 40	<i>Aging</i> Pajak Hotel Tahun Anggaran 2025
Lampiran 41	<i>Aging</i> Pajak Restoran Tahun Anggaran 2025
Lampiran 42	<i>Aging</i> Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 43	<i>Aging</i> Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025
Lampiran 44	<i>Aging</i> Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 45	<i>Aging</i> Pajak Parkir Tahun Anggaran 2025
Lampiran 46	<i>Aging</i> Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 47	<i>Aging</i> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 48	Daftar Piutang Pajak PBB dan <i>Aging</i> Pajak PBB Tahun Anggaran 2025
Lampiran 49	<i>Aging</i> Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 50	<i>Aging</i> Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan
Lampiran 51	<i>Aging</i> Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 52	<i>Aging</i> Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Lampiran 53	<i>Aging</i> Denda Pajak Hotel Tahun Anggaran 2025
Lampiran 54	<i>Aging</i> Denda Pajak Restoran Tahun Anggaran 2025
Lampiran 55	<i>Aging</i> Denda Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 56	<i>Aging</i> Denda Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025
Lampiran 57	<i>Aging</i> Denda Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 58	<i>Aging</i> Denda Pajak Parkir Tahun Anggaran 2025
Lampiran 59	<i>Aging</i> Denda Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 60	<i>Aging</i> Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 61	<i>Aging</i> Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 62	Persediaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 63	Daftar Persediaan Obat <i>Expired</i> Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025
Lampiran 64	Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) (Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian) per 31 Desember 2025
Lampiran 65	Rekapitulasi Dana Bergulir yang Disalurkan dari Tahap I sampai Tahap XVII sampai Bulan Desember 2025
Lampiran 66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 67	Daftar Penyertaan pada BPD Bali per 31 Desember 2025
Lampiran 68	Daftar Penyertaan pada PDAM Buleleng per 31 Desember 2025
Lampiran 69	Daftar Penyertaan pada PD BPR Bank Buleleng 45 per 31 Desember 2025

Lampiran 70	Daftar Penyertaan pada PD Swatantra per 31 Desember 2025
Lampiran 71	Daftar Penyertaan pada PD Pasar per 31 Desember 2025
Lampiran 72	Daftar Penyertaan pada Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Bali Mandara (Jamkrida) per 31 Desember 2025
Lampiran 73	Daftar Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025
Lampiran 74	Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025
Lampiran 75	Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025
Lampiran 76	Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025
Lampiran 77	Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025
Lampiran 78	Daftar Aset <i>Extracombabel</i> per 31 Desember 2025
Lampiran 79	Daftar Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2025
Lampiran 80	Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025
Lampiran 81	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025
Lampiran 82	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2025
Lampiran 83	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025
Lampiran 84	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025
Lampiran 85	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025
Lampiran 86	Daftar Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025
Lampiran 87	Daftar Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2025
Lampiran 88	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025
Lampiran 89	Daftar Mutasi Properti Investasi Tahun 2025
Lampiran 90	Deposit <i>Coretax</i> Tahun Anggaran 2025
Lampiran 91	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2025
Lampiran 92	Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025
Lampiran 93	Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025
Lampiran 94	Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025
Lampiran 95	Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2025
Lampiran 96	Pekerjaan Fisik yang Belum Selesai Tahun Anggaran 2025
Lampiran 97	Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025
Lampiran 98	Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 99	Laporan Keuangan Bank BPD Bali
Lampiran 100	Laporan Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara
Lampiran 101	Laporan Keuangan PT BPR Bank Buleleng
Lampiran 102	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perumda Pasar Argha Nayottama
Lampiran 103	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perumda Swatantra
Lampiran 104	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng
Lampiran 105	Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Buleleng
Lampiran 106	Laporan Keuangan RSUD Giri Emas
Lampiran 107	Laporan Keuangan RSUD Tangguwisia



BUPATI BULELENG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Singaraja, 25 Mei 2026

BUPATI BULELENG

I NYOMAN SUTJIDRA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	2.566.219.756.194,00	2.510.758.314.242,81	97,84	2.534.670.913.550,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	766.907.018.969,00	720.900.446.972,06	94,00	509.474.781.931,42
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	389.826.966.325,00	375.151.097.294,29	96,24	251.948.162.383,77
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	301.696.781.554,00	245.384.801.388,48	81,33	217.716.187.749,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	38.012.000.000,00	34.879.086.540,22	91,76	30.720.076.754,33
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	37.371.271.090,00	65.485.461.749,07	175,23	9.090.355.043,60
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.799.312.737.225,00	1.789.857.867.270,75	99,47	1.990.090.996.222,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.551.727.600.750,00	1.568.409.472.971,95	101,08	1.571.261.336.041,00
Dana Perimbangan		-	-	-	1.406.029.274.041,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.4	138.553.772.000,00	137.635.855.564,00	99,34	132.354.323.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.5	22.179.842.000,00	22.179.842.000,00	100,00	32.877.739.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	29.867.451.000,00	29.612.087.800,00	99,15	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	1.004.173.362.750,00	1.024.682.543.691,00	102,04	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.3	356.953.173.000,00	354.299.143.916,95	99,26	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	247.585.136.475,00	221.448.394.298,80	89,44	418.829.660.181,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	150.501.260.906,00	142.615.340.289,00	94,76	251.472.859.336,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	97.083.875.569,00	78.833.054.009,80	81,20	167.356.800.845,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	-	-	-	35.105.135.397,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3	-	-	-	35.105.135.397,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	2.755.226.750.175,00	2.603.740.639.517,40	94,50	2.407.477.114.683,48
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.143.349.513.741,14	2.038.584.877.333,26	95,11	1.937.542.023.599,43
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.359.836.472.838,14	1.304.457.257.192,00	95,93	1.155.026.896.491,70
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	680.950.009.953,00	633.773.196.059,15	93,07	643.244.315.051,73
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	100.131.125.000,00	97.973.991.582,11	97,85	131.378.812.056,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	2.431.905.950,00	2.380.432.500,00	97,88	7.892.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	195.296.424.057,86	172.415.291.064,14	88,28	183.312.147.805,05
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	800.500.000,00	650.000.000,00	81,20	672.654.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	77.145.827.632,90	69.238.815.589,95	89,75	54.016.056.933,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	12.800.173.569,81	10.194.069.839,19	79,64	39.123.065.723,76
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	80.580.535.022,36	69.199.953.306,00	85,88	63.775.377.784,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	20.024.677.166,00	20.001.809.535,00	99,89	22.959.845.424,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	3.944.710.666,79	3.130.642.794,00	79,36	2.765.147.940,07
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	13.992.736.391,00	11.101.497.487,00	79,34	53.013.101,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	13.992.736.391,00	11.101.497.487,00	79,34	53.013.101,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	402.588.075.985,00	381.638.973.633,00	94,80	286.569.930.178,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	53.830.280.407,00	38.443.163.822,00	71,42	24.497.854.156,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	49.452.322.850,00	35.117.598.420,00	71,01	21.649.305.794,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1	4.377.957.557,00	3.325.565.402,00	75,96	2.848.548.362,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	348.757.795.578,00	343.195.809.811,00	98,41	262.072.076.022,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2	357.450.000,00	-	-	200.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2	348.400.345.578,00	343.195.809.811,00	98,51	261.872.076.022,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(189.006.993.981,00)	(92.982.325.274,59)	49,20	127.193.798.866,94

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3	189.006.993.981,00	189.306.993.980,93	100,16	62.113.195.113,99
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	189.306.993.981,00	189.306.993.980,93	100,00	62.113.195.113,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1	189.306.993.981,00	189.306.993.980,93	100,00	62.113.195.113,99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	300.000.000,00	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2	300.000.000,00	-	-	-
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		189.006.993.981,00	189.306.993.980,93	100,16	62.113.195.113,99
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)	5.1.4	-	96.324.668.706,34	-	189.306.993.980,93

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI BULELENG

I Nyoman Sutjidra



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	189.306.993.980,93	62.113.996.633,99
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	189.306.993.980,93	62.113.195.113,99
Subtotal		-	801.520,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	96.324.668.706,34	189.306.993.980,93
Subtotal		96.324.668.706,34	189.307.795.500,93
KOREKSI KESALAHAN +/- PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		-	(801.520,00)
LAIN-LAIN		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.4	96.324.668.706,34	189.306.993.980,93

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI BULELENG

I Nyoman Sutjidra



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.3.1	3.280.143.977.550,90	3.251.141.773.122,34
ASET LANCAR	5.3.1.1	265.752.965.453,37	336.096.490.491,53
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	96.324.668.706,34	189.306.993.980,93
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	87.347.574.897,21	177.063.262.292,36
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1	54.664.578,00	240.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1	-	25.000,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1	7.464.919.671,55	7.990.322.766,38
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1	-	2.408.331.427,77
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1	389.823.307,58	406.168.704,42
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1	1.067.686.252,00	1.438.643.790,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	130.396.126.997,75	125.127.211.638,89
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	51.840.870.880,29	15.632.312.222,75
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	5.172.785.736,07	4.455.571.402,35
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.4	20.296.474.000,00	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.5	5.819.859.232,00	41.993.205.593,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.6	46.961.947,26	56.655.697,26
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2.7	(87.416.973.858,01)	(82.046.951.279,41)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.3	-	9.155.786,30
Persediaan	5.3.1.1.4	43.272.191.811,67	41.562.335.449,46
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	248.008.089.721,11	251.350.253.062,16
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	386.660.318,00	380.047.400,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	247.621.429.403,11	250.970.205.662,16
ASET TETAP	5.3.1.3	2.568.572.078.634,77	2.452.682.885.478,46
Tanah	5.3.1.3.1	844.630.348.031,67	785.577.678.606,67
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.018.528.136.786,20	947.293.193.762,85
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.123.011.179.322,36	1.089.829.933.237,85
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.434.971.451.528,86	1.322.866.613.052,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	205.393.883.638,30	185.590.033.953,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	23.930.670.851,25	35.232.236.094,79
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.081.893.591.523,87)	(1.913.706.803.229,00)
ASET LAINNYA	5.3.1.4	40.819.376.106,90	46.833.590.832,12
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.1	2.902.070.260,00	4.454.146.560,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	43.259.130.915,69	51.267.337.095,16
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	(2.389.934.862,00)	(3.969.568.950,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.4	(2.951.890.206,79)	(5.293.127.873,04)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.5	-	374.804.000,00
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.5	156.991.467.634,75	164.178.553.258,07
Properti Investasi Tanah	5.3.1.5	17.202.001.200,00	17.202.001.200,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5	179.839.864.583,01	179.839.864.583,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	5.3.1.5	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.1	(40.050.398.148,26)	(32.863.312.524,94)
JUMLAH ASET		3.280.143.977.550,90	3.251.141.773.122,34
KEWAJIBAN	5.3.2	126.696.273.057,40	106.899.997.561,83
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	126.696.273.057,40	106.899.997.561,83

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	182.512.743,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	1.124.826.408,23	686.737.302,82
Utang Belanja	5.3.2.1.3	125.343.991.222,14	106.172.712.476,33
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	44.942.684,03	40.547.782,68
EKUITAS	5.3.3	3.153.447.704.493,50	3.144.241.775.560,51
EKUITAS	5.3.3	3.153.447.704.493,50	3.144.241.775.560,51
Ekuitas	5.3.3	3.153.447.704.493,50	3.144.241.775.560,51
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.280.143.977.550,90	3.251.141.773.122,34

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI BULELENG
[Signature]
Nyoman Sutjidra



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	2.517.903.165.863,09	2.408.514.656.312,36	109.388.509.550,73	4,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	775.103.567.543,14	514.187.991.217,03	260.915.576.326,11	50,74
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	385.898.158.766,15	265.520.784.322,92	120.377.374.443,23	45,34
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	281.155.270.940,61	200.332.877.049,95	80.822.393.890,66	40,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	42.084.887.352,85	38.128.194.261,94	3.956.693.090,91	10,38
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	65.965.250.483,53	10.206.135.582,22	55.759.114.901,31	546,33
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	1.635.970.335.345,75	1.828.803.860.203,00	(192.833.524.857,25)	(10,54)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	1.450.695.287.407,95	1.435.718.826.041,00	14.976.461.366,95	1,04
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1	-	1.402.841.087.041,00	(1.402.841.087.041,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.2.1	49.533.757.800,00	-	49.533.757.800,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.2.1	1.024.682.543.691,00	-	1.024.682.543.691,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	5.4.1.2.1	354.299.143.916,95	-	354.299.143.916,95	-
Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1	22.179.842.000,00	32.877.739.000,00	(10.697.897.000,00)	(32,54)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	185.275.047.937,80	393.085.034.162,00	(207.809.986.224,20)	(52,87)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.2	106.441.993.928,00	244.298.801.397,00	(137.856.807.469,00)	(56,43)
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2	78.833.054.009,80	148.786.232.765,00	(69.953.178.755,20)	(47,02)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	106.829.262.974,20	65.522.804.892,33	41.306.458.081,87	63,04
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	106.829.262.974,20	30.417.669.495,33	76.411.593.478,87	251,21
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	-	35.105.135.397,00	(35.105.135.397,00)	(100,00)
BEBAN DAERAH	5.4.2	2.515.187.454.456,13	2.304.606.534.615,03	210.580.919.841,10	9,14
BEBAN OPERASI		2.270.197.856.979,13	2.146.754.443.461,03	123.443.413.518,10	5,75
Beban Pegawai	5.4.2.1	1.316.611.470.265,00	1.163.858.372.499,00	152.753.097.766,00	13,12
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	654.011.319.525,94	659.222.041.664,80	(5.210.722.138,86)	(0,79)
Beban Hibah	5.4.2.3	114.169.518.057,61	141.129.728.662,20	(26.960.210.604,59)	(19,10)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.4	3.443.232.500,00	7.892.000.000,00	(4.448.767.500,00)	(56,37)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.5	10.888.115.408,33	6.089.475.850,22	4.798.639.558,11	78,80
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.6	171.074.201.222,25	168.562.824.784,81	2.511.376.437,44	1,49
BEBAN TRANSFER	5.4.2.7	244.989.597.477,00	157.852.091.154,00	87.137.506.323,00	55,20
Beban Bagi Hasil	5.4.2.7.1	39.429.643.230,00	28.134.338.132,00	11.295.305.098,00	40,15
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.7.2	205.559.954.247,00	129.717.753.022,00	75.842.201.225,00	58,47
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		2.715.711.406,96	103.908.121.697,33	(101.192.410.290,37)	(97,39)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3	82.368.320,60	61.502.315,98	20.866.004,62	33,93
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3	82.368.320,60	61.502.315,98	20.866.004,62	33,93
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.4	5.166.294.589,85	4.269.616.422,01	896.678.167,84	21,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.4	4.796.281.124,05	4.269.616.422,01	526.664.702,04	12,34
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.4	370.013.465,80	-	370.013.465,80	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(5.083.926.269,25)	(4.208.114.106,03)	(875.812.163,22)	20,81
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.368.214.862,29)	99.700.007.591,30	(102.068.222.453,59)	(102,38)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
POS LUAR BIASA	5.4.5				
BEBAN LUAR BIASA	5.4.5	10.038.697.487,00	53.013.101,00	9.985.684.386,00	18.836,26
Beban Luar Biasa	5.4.5	10.038.697.487,00	53.013.101,00	9.985.684.386,00	18.836,26
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.6	(12.406.912.349,29)	99.646.994.490,30	(112.053.906.839,59)	(112,45)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI BULELENG

I Nyoman Sutjidra



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1	2.510.527.674.685,81	2.534.318.836.577,42
Pajak Daerah	5.5.1.1	375.151.097.294,29	251.948.162.383,77
Retribusi Daerah	5.5.1.1	245.384.801.388,48	217.716.187.749,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	34.879.086.540,22	30.720.076.754,33
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	65.254.822.192,07	8.738.278.070,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1	1.568.409.472.971,95	1.571.261.336.041,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1	221.448.394.298,80	418.829.660.181,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1	-	35.105.135.397,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2	2.431.325.348.453,26	2.224.164.966.878,43
Belanja Pegawai	5.5.1.2	1.304.457.257.192,00	1.155.026.896.491,70
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2	633.773.196.059,15	643.244.315.051,73
Belanja Hibah	5.5.1.2	97.973.991.582,11	131.378.812.056,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	2.380.432.500,00	7.892.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2	11.101.497.487,00	53.013.101,00
Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2	38.443.163.822,00	24.497.854.156,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2	343.195.809.811,00	262.072.076.022,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		79.202.326.232,55	310.153.869.698,99
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1	230.639.557,00	352.076.973,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1	230.639.557,00	352.076.973,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2	172.415.291.064,14	183.312.147.805,05
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2	650.000.000,00	672.654.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	69.238.815.589,95	54.016.056.933,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	10.194.069.839,19	39.123.065.723,76
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.2	69.199.953.306,00	63.775.377.784,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	20.001.809.535,00	22.959.845.424,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2	3.130.642.794,00	2.765.147.940,07
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(172.184.651.507,14)	(182.960.070.832,05)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1	145.823.156.561,58	137.320.814.020,91
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	145.823.156.561,58	137.320.814.020,91
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	145.823.156.561,58	137.320.814.020,91
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	145.823.156.561,58	137.320.814.020,91
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		-	-

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	5.5.5	(92.982.325.274,59)	127.193.798.866,94
SALDO AWAL KAS	5.5.6	189.306.993.980,93	62.113.996.633,99
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	5.5.7	-	(801.520,00)
SALDO AKHIR KAS	5.5.8	96.324.668.706,34	189.306.993.980,93

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI BULELENG

I Nyoman Sutjidra



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.144.241.775.560,51	2.996.392.016.485,57
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	(12.406.912.349,29)	99.646.994.490,30
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	21.612.841.282,28	48.202.764.584,64
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	5.6.3	262.778.857,64	10.280.767.093,47
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	5.6.3	(7.250.919.216,68)	(3.176.097.253,31)
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	5.6.3	34.808.425.220,26	41.119.551.306,10
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	5.6.3	(494.393.110,94)	-
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3	(5.713.050.468,00)	(21.456.561,62)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.153.447.704.493,50	3.144.241.775.560,51

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI BULELENG

I Nyoman Sutjidra